KATALOG: 9302020.3309

# PRODUK DOMESTIK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN BOYOLALI 2019-2023



Https://poyolalikab.bps.go.id

KATALOG: 9302020.3309

## PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BOYOLALI MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

https://oyolalikab.bps.go.io



### PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN BOYOLALI 2019- 2023

 Nomor Publikasi
 : 33090.24003

 Katalog BPS
 : 9302020.3309

 Ukuran Buku
 : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiii + 52 halaman

Naskah :

BPS Kabupaten Boyolali

Gambar Kover:

BPS Kabupaten Boyolali

Diterbitkan Oleh

© BPS Kabupaten Boyolali

Dicetak Oleh :

Dilarang mereproduksidan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## **TIM PENYUSUN**

### Penanggung Jawab:

Ir. Sutirin, M.Si

### Penulis:

Fajra Beauty Asri, SST

### Pengolah Data:

Fajra Beauty Asri, SST

### Gambar Kulit:

Fajra Beauty Asri, SST

### KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu : (i) pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/industry), (ii) pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/expenditure), dan (iii) pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/income). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Boyolali, April 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK Kabupaten Boyolali,

Ir. Sutirin, M.Si

Https://poyolalikab.bps.go.id

### **DAFTAR ISI**

	Halan	nan
Kata Per	ngantar	v
Daftar Is	si	vii
Daftar T	abel	ix
Daftar G	Grafik	xi
Daftar L	ampiran	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
	B. Kegunaan Statistik PDRB.	3
BAB II	METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
	A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	6
	B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)	9
	C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	11
	D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	14
	E. Perubahan Inventori	19
	F. Ekspor Impor Barang dan Jasa	22
BAB III	TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BOYOLALI 2019-2023	25
	A. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Boyolali menurut Pengeluaran	26
	B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	31
	C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	33
	D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	33
	E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	35
	F. Perkembangan Perubahan Inventori	36
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB	38
	A. PDRB PERKAPITA	39
	B. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	40
	C. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PMTB	40
	D. Neraca Perdagangan (Trade Balance)	41
	PENUTUP	43
BAB V	LAMPIRAN	45

Https://poyolalikab.bps.go.id

### **DAFTAR TABEL**

Halama	ın
Tabel 1. PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023(Miliar Rp)	26
Tabel 2. PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Miliar	
<i>Rp</i> )	27
Tabel 3. Distribusi PDRB Adh Berlaku Kabupaten Boyolali menurut Pengeluaran	
Tahun 2019-2023(Persen)	28
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun	
2019-2023(Persen)	30
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Persen)	30
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun	
2019-2023	32
Tabel 7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Tahun 2019-2023	33
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	
Tahun 2019-2023	34
Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB Tahun 2019-2023	36
Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2019-2023	37
Tabel 11. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita	
Tahun 2019-2023	39
Tabel 12. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	40
Tahun 2019-2023	
Tabel 13. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB	41
Tahun 2019-2023	
Tabel 14. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2019-2023	42

Https://poyolalikab.bps.go.id

### **DAFTAR GRAFIK**

H	Ialaman
Grafik 1. Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 menurut	
Pengeluaran Tahun 2019-2023.	28
Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2019 dan	
Tahun 2023	29

Https://poyolalikab.bps.go.id

### **DAFTAR LAMPIRAN**

Hal	aman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga	
Berlaku (ADHB) menurut Pengeluaran(Milyar Rupiah)	46
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga	
Konstan (ADHK) 2010 menurut Pengeluaran 2019-2023 (Milyar	
Rupiah)	47
Lampiran 3 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	
2010 menurut Pengeluaran 2019-2023(Persen)	48
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	
menurut Pengeluaran 2019-2023 (Persen)	49
Lampiran 5. Perubahan Indeks Harga Implisit PDRB (Tahun 2010=100)	
menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Persen)	50
menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Persen)	

Https://poyolalikab.bps.go.id

# BAB I PENDAHULUAN

### A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama setahun, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu selama setahun.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

### 1. Pendekatan Produksi,

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/region dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. JasaKeuangan danAsuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15.

Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

### 2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

### 3. Pendekatan Pengeluaran,

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga,(2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetapdomestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

### B. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

- PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- 2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
- 3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah/region.
- 4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.
- 5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- 6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
- 7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

## BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

### A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian.Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal.Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

- 1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
- 2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
- 3. Pakaian dan alas kaki
- 4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
- 5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
- 6. Kesehatan
- 7. Angkutan
- 8. Komunikasi
- 9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
- 10. Pendidikan
- 11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
- 12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

- 1. Makanan, Minuman, dan Rokok
- 2. Pakaian dan Alas Kaki
- 3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- 4. Kesehatan dan Pendidikan
- 5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- 6. Hotel dan Restoran
- 7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

• Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (owner occupied dwellings);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri.Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

### 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi perkapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (adjustment). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (adjustment) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT adhBerlaku. PKRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

### B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

### 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah:

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
   Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil up-dating direktori LNPRT.
   Informasi yang diperoleh dari hasil up-dating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu meng- gunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut:

a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

 $x_{ii}$ : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

 $x_{ii}$ : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

 $n_i$ : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i: Jenis lembaga LNPRT, i = 1, 2, 3, ..., 7

j: jenis pengeluaran LNPRT, j = 1, 2, 3, ..., 19

b. Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^{7} \sum_{j=1}^{19} \overline{x}_{ij} \times N_{i}$$

X: PKLNPRT adh Berlaku

 $N_i$ : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRTadh Berlaku. PKLNPRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKLNPRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

### C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiscaldanmoneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa/Kelurahan) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) KabupatenBoyolalimencakup PK-Pemerintah KabupatenBoyolali; PK-Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dimana KabupatenBoyolali berada; dan PK-Pemerintah Kelurahan yang ada di wilayah KabupatenBoyolali.

### 2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P KabupatenBoyolali adalah:

- Data realisasi APBN untuk instansi vertikal di KabupatenBoyolali (KPPN Semarang)
- Data realisasi APBD (DPPKAD)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari KPPN Semarang, DPPKAD dan BKD Kabupaten Boyolaliserta Indeks Harga dari BPS.

### a. Pengeluaran Konsumsi PemerintahKabupaten/Kotaadh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

### PK-P adhBerlaku=

Output non pasar-penjualan barangdan jasa + Output Bank Indonesia

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten/Kota, PK-P adh Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota itu sendiri + pengeluaran akhir

konsumsi instansi vertikal di kabupaten/kota tersebut + pengeluaran akhirseluruh pemerintah desa/kelurahan yang ada diwilayah kabupaten/kotatersebut.

### b. Pengeluaran Konsumsi PemerintahKabupaten/Kota adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

### D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu.Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya

masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

### PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

### 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah:

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Data Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga.
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-

masing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "supply" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

### Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di "deflate" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

### Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (commodity flow approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (supply), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "reflate" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men"deflate" PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment*, *literary*, *or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (Trade and Transport Margin) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

### E. PERUBAHAN INVENTORI

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas Kabupaten, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran

untuk tujuan dijual;

- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementrian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

### Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (balance sheet) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adhBerlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara men-deflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-inflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

### Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (commodity flow).Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan:

- a. men-deflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai,
- b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;

- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

### F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah.Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah tersebut
- Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah tersebut
   Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah

- Ekspor antar daerah
- Impor antar daerah

### 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah:

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

https://boyolalikab.bps.go.id

### BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BOYOLALI 2019-2023

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Boyolali akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2019 sampai dengan 2023, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik KabupatenBoyolali digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

### A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN BOYOLALI MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Boyolali menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (adh) Berlaku dan atas dasar harga (adh) Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. PDRBAdh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	25 395 ,43	25 524 ,13	26 131,51	28 849 ,63	31 581,61
2. Konsumsi LNPRT	521 ,76	515 ,80	540 ,92	610 ,40	675 ,63
3. Konsumsi Pemerintah	2 225 ,38	2 134 ,74	2 279 ,05	2 317 , 27	2 455 ,67
4. PMTB	7 182 ,20	6 785 ,81	7 386 ,23	7 889 ,92	8 778 ,791
5. Perubahan Inventori	77, 349	398,98	372 ,14	430 ,74	473 ,81
6. Net Ekspor	-3 008 ,55	-2 671 ,90	-1 812 ,88	-1 309,02	-1 229 ,96
Total PDRB	32 665 ,98	32 687 ,59	34 896 ,96	38 788,93	42 735,55

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB KabupatenBoyolali adh Berlaku selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Tabel 2. PDRBAdh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023

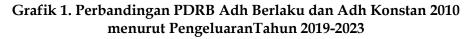
(Milyar Rupiah)

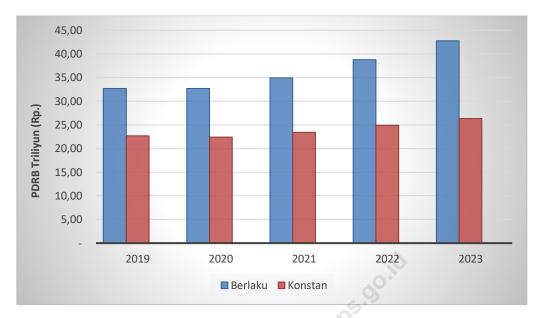
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	17 383 ,18	17 288 ,26	17 507 ,54	18 570 ,05	19 573 ,97
2. Konsumsi LNPRT	324 ,70	315 ,60	320 ,56	336 ,25	359 ,79
3. Konsumsi Pemerintah	1 395 ,26	1 343 ,88	1 364 ,72	1 369 ,30	1 410 ,38
4. PMTB	4 613 ,87	4 358 ,14	4 709 ,83	4 813 ,49	5 315 ,15
5. Perubahan Inventori	189 ,43	358 ,70	300 ,34	339 ,25	352 ,82
6. Net Ekspor	-1 225 ,35	-1 254 ,85	-755 ,62	-497 ,03	-677 ,80
Total PDRB	22 681 ,10	22 409 ,73	23 447 ,37	24 931 ,30	26 334 ,30

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

Selain dinilai adh Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2019–2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Boyolali berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Dari grafik berikut, nampak bahwa nilai PDRB adh Berlaku lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh harga telah ditiadakan.





Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3. Distribusi PDRB Adh Berlaku KabupatenBoyolali menurut PengeluaranTahun 2019 – 2023
(Persen)

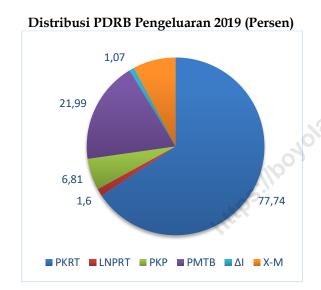
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	77,74	78,09	74,88	74,38	73,90
2. Konsumsi LNPRT	1,60	1,58	1,55	1,57	1,58
3. Konsumsi Pemerintah	6,81	6,53	6,53	5,97	5,75
4. PMTB	21,99	20,76	21,17	20,34	20,54
5. Perubahan Inventori	1,07	1,22	1,07	1,11	1,11
6. Net Ekspor	-9,21	-8,17	-5,19	-3,37	-2,88
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

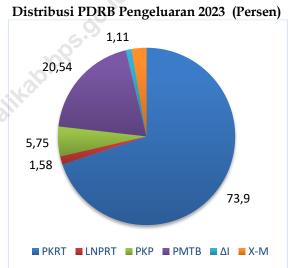
<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2019 – 2023, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 70 persen).

Pengeluaran untuk kapital (PMTB) memberi kontribusi sekitar 20 persen, sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada sekitar 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Pada tahun 2019-2023 perdagangan Kabupaten Boyolali yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor, yang berarti bahwa perdagangan Kabupaten Boyolali selalu menunjukkan posisi "defisit".

Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2019 dan Tahun 2023





X-M : Ekspor Neto  $\Delta I$  : Perubahan Inventori

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dari tahun 2019 - 2023 masing-masing pertumbuhan sebesar 5,96 (2019); -,1,20 (2020), 4,63 (2021); 6,33 (2022), dan 5,63 (2023). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 6,33 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 (-1,20 persen).

Tabel 4. Pertumbuhan PDRBAdh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2019 – 2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,97	-0,55	1,27	6,07	5,41
2. Konsumsi LNPRT	6,76	-2,80	1,57	4,89	7,00
3. Konsumsi Pemerintah	1,39	-3,68	1,55	0,34	3,00
4. PMTB	4,51	-5,54	8,07	2,20	10,42
5. Perubahan Inventori	5,49	89,35	-16.27	12,96	4,00
6. Net Ekspor	14,20	-2,41	39,78	34,22	-36,37
Total PDRB	5,96	-1,20	4,63	6,33	5,63

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

### B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data pada Tabel 5 menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2019 – 2023 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dikarenakan pandemi covid 19.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 78,09 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu 73,90 persen. Pulihnya ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik maupun yang berasal dari impor turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2019 konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 22,18 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun dan pada tahun 2020 rata-rata konsumsi per kapita Kabupaten Boyolali sebesar 24,08 juta rupiah. Pada Tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi 24,44 juta rupiah, dikarenakan ekonomi sudah mulai menanjak pulih dari pandemic COVID-19.

Tabel 5. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2019—2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah					
Tangga					
a. ADHB (Milyar Rp)	25 395 ,43	25 524 ,13	26 131,51	28 849 ,63	31 581,61
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	17 383 ,18	17 288 ,26	17 507 ,54	18 570 ,05	19 573 ,97
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	77,74	78,09	74,88	74,38	73,90
Rata-rata konsumsi per-					·
kapita/tahun (Juta Rp)					
a. ADHB (Milyar Rp)	0,02591	0,02407	0,02442	0,02671	0,02897
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	0,01774	0,01630	0,01636	0,01719	0,01796
Pertumbuhan <sup>1)</sup> (% ADHK)	4,97	-0,55	1,27	6,07	5,41
Jumlah penduduk (org)	980 086	1 060 360	1 069 986	1 080 168	1 090 129

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

Apabila dilihat menurut harga konstan, pertumbuhan konsumsi perkapita Kabupaten Boyolali berada pada kisaran 4 sampai dengan 6 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,07 persen dan terendah sebesar -0,55 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan konsumsi per kapita setiap tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 4,97 persen pada tahun 2019. Kemudian pada empat tahun berikutnya yaitu berturut-turut sebesar -0,55 persen (2020); 1,27 persen (2021); 6,07 persen (2022) dan 5,41 persen pada tahun 2023.

### C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu kurang dari 2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah masih dapat ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

PKLNPRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	521 ,76	515 ,80	540 ,92	610 ,40	675 ,63
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	324 ,70	315 ,60	56, 320	25, 336	359 ,79
Proporsi terhadap PDRB (%) <i>ADHB</i> )	1,60	1,58	1,55	1,57	1,58
Pertumbuhan (% ADHK)	6,76	-2,80	1,57	4,89	7,00

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas, dapat dilihat pertumbuhan konsumsi LNPRT selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif. Pertumbuhan tinggi yang terjadi pada tahun 2023 salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran ormas, parpol, LSM dan lembaga lainnya karena adanya kampanye dalam rangka pemilihan umum (legislatif) serta pemilihan presiden pada tahun 2023. Pada tahun 2022 pertumbuhannya sudah mulai naik lagi karena kondisinya sudah mulai stabil dari pandemi covid19.

### D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Boyolali serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 2,23 triliun rupiah, kemudian meningkat hingga pada tahun 2023 nilainya mencapai 2,46 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing

tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Milyar Rp)	2 225 ,38	2 134 ,74	2 279 ,05	2 317 , 27	2 455 ,67
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	1 395 ,26	1 343 ,88	1 364 ,72	1 369 ,30	1 410 ,38
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	6,81	6,53	6,53	5,97	5,75
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun ( <i>Juta Rp</i> )					
a. ADHB (Juta Rp)	2,27	2,01	2,13	2,15	2,25
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	1,42	1,27	1,28	1,27	1,29
Pertumbuhan <sup>1)</sup> (% ADHK)	1,39	-3,68	1,55	0,34	3,00
Jumlah penduduk (org)	980 086	1 060 360	1 069 986	1 080 168	1 090 129

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga terus mengalami penurunan, dari 6,81 persen ditahun 2019 menjadi 6,53 persen pada tahun 2020 dan kembali turun menjadi 5,97 persen pada tahun 2020, kemudian semakin turun menjadi 5,75 persen di tahun 2023.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah perkapita adh Berlaku sebesar 2,23 juta rupiah dan meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,28 juta rupiah. Pada tahun 2023 konsumsi pemerintah per kapita meningkat mencapai 2,45 juta rupiah.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

Konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata perkapita. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2019-2023, pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,00 persen, dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -3,68 persen yang diakibatkan oleh adanya pandemi covid 19.

### E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>2</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), komponen PMTB juga menunjukkan senantiasa mengalami fluktuasi pertumbuhan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, dalam kurun waktu 2019–2023 yaitu 4,51 persen (2019). Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -5,54 persen dan pada tahun 2021 mulai bangkit lagi menjadi 8,07 persen karena kondisi akibat pandemi covid 19 sudah mulai beranjak kembali normal dan di tahun 2022 melandai menjadi 2,20 persen, kemudian meningkat tajam sebesar 10,42% dikarenakan Pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta yang melewati wilayah Boyolali seperti beberapa wilayah seperti Kecamatan Banyudono dan juga Kecamatan Sawit.

 $^2 Selain\ bagian\ lain\ yang\ menjadi\ konsumsi\ antara,\ konsumsi\ akhir,\ ataupun\ diekspor$ 

Tinjauan Perekonomian Kabupaten Boyolali 2019-2023

Tabel 8. Perkembangan dan Struktur PMTB

Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Milyar Rp)	7 182 ,20	6 785 ,81	7 386 ,23	7 889 ,92	8 778 ,791
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	4 613 ,87	4 358 ,14	4 709 ,83	4 813 ,49	5 315 ,15
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	21,99	20,76	21,17	20,34	20,54
Pertumbuhan <sup>1)</sup> (% ADHK)	4,51	-5,54	8,07	2,20	10,42

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

Dari sisi proporsi adh berlaku, proporsi PMTB lebih stabil setiap tahunnya, dan selama lima tahun ini berada pada kisaran 20,34-21,99 persen, dengan proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2019. Proporsi PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 21,99 persen dan terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 20,34 persen.

### F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 9. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Juta Rp)	77, 349	398, 98	372 ,14	430 ,74	473 ,81
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	189 ,43	358 ,70	300 ,34	339 ,25	352 ,82

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis dengan rinci, maka untuk perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

https://boyolalikab.bps.go.id

### BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

### A. PDRB PERKAPITA

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 10. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	32 665 ,98	59, 87 32	34 896 ,96	38 788 ,93	42 735 ,55
- ADHK 2010	22 681 ,10	22 409 ,73	23 447 ,37	24 931 ,30	26 334 ,30
PDRB perkapita					
(Juta Rp)					
- ADHB	33,33	30,83	32,61	35,94	39,20
- ADHK 2010	23,14	21,13	21,91	23,09	24,16
Jumlah penduduk	980 086	1 060 360	1 069 986	1 080 168	1 090 129
Pertumbuhan	5,96	-1,20	4,63	6,33	5,63

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

PDRB perkapitaKabupaten Boyolali tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 10), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Boyolali rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing

tahun tersebut. PDRB perkapita Kabupaten Boyolali tahun 2020 dan 2021 sedikit turun jika dibandingkan 2019 karena pandemi covid 19, namun kembali menguat di tahun 2022.

Sementara itu pertumbuhan perkapita secara "riil" juga selalu meningkat di kisaran 5 persen. Pertumbuhan PDRB perkapita tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata di atas 0,5 persen setiap tahunnya.

### B. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Boyolali digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 11. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	25 395 ,43	25 524 ,13	26 131,51	28 849 ,63	31 581,61
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	7 182 ,20	6 785 ,81	7 386 ,23	7 889 ,92	8 778 ,791
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	3,54	3,76	3,54	3,66	3,60

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir berkisar antara 3,54 sampai 3,76. Hal ini dapat diartikan penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 3,54 sampai 3,76 kali lebih besar dibanding untuk PMTB. Nilai ini cenderung menurun selama lima tahun terakhir.

### C. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi

tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 12. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2019—2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
(Milyar Rp)					
a . Rumah tangga	25 395 ,43	25 524 ,13	26 131,51	28 849 ,63	31 581,61
b. LNPRT	521 ,76	515 ,80	540 ,92	610 ,40	675 ,63
c. Pemerintah	2 225 ,38	2 134 ,74	2 279 ,05	2 317 , 27	2 455 ,67
Jumlah	28 142 ,56	28 174 ,66	28 951 ,48	31 777 ,30	34 712 ,92
PDRB (ADHB)	32 665 ,98	32 687 ,59	34 896 ,96	38 788,93	42 735,55
(Milyar Rp)	32 003 ,98	32 067 ,39	34 050 ,50	30 700,33	42 733,33
Proporsi	0,86	0,86	0,83	0,82	0,81

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

Lebih dari 80 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kabupaten Boyolali digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Proporsi ini relatif tetap sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, yaitu berkisar antara 81 sampai 86 persen. Sedangkan produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir, yaitu PMTB memiliki peran yang relatif kecil, sebesar kurang dari 30 persen.

### D. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "Ekspor Neto", apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selama periode 2019-2023, posisi perdagangan barang dan jasa KabupatenBoyolalidengan luar negeri dan antar kabupaten/kota/provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa

Kabupaten Boyolali selalu dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran uang keluar, yang dalam konteks lain disebut sebagai "hutang luar wilayah".

Tabel 13. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net ekspor (X - M) (Milyar Rp)	(3 008 ,55)	(2 671 ,86)	(1 812 ,88)	(1 309 ,02)	(1 229 ,96)

https://boyolalikab.bps.go.id

# BAB V PENUTUP

Penutup

- 1. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
- 2. Nominal PDRB KabupatenBoyolali tahun 2023 adh Berlaku mencapai 42 735 ,79 milyar rupiah. Dari nilai sebesar itu sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai 81 persen dimana 73 persennya adalah konsumsi rumah tangga. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang sangat dominan, tidak dapat dipungkiri bahwa komponen ini adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali. Tahun 2023 ekonomi Kabupaten Boyolali tumbuh sebesar 5,63 persen dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,41 persen.
- 3. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Kabupaten Boyolali dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Proporsi PMTB ini berada pada kisaran 20,54 persen, atau dapat dikatakan peranan investasi dalam perekonomian Kabupaten Boyolali sekitar 21 persen.
- 4. Nilai impor Kabupaten Boyolali lebih besar dari nilai ekspornya, sehingga setiap tahun terjadi defisit neraca perdagangan.

## LAMPIRAN HHPS:IIIO YO TA III AB TA A SHIRA BARRAN

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBAdhb) menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah) Provinsi Jawa Tengah (33) Kabupaten Boyolali (09)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	25 395 ,43	25 524 ,13	26 131,51	28 849 ,63	31 581,61
2. Konsumsi LNPRT	521 ,76	515 ,80	540 ,92	610 ,40	675 ,63
3. Konsumsi Pemerintah	2 225 ,38	2 134 ,74	2 279 ,05	2 317 , 27	2 455, 67
4. PMTB	7 182 ,20	6 785 ,81	7 386 ,23	7 889 ,92	8 778 ,791
5. Perubahan Inventori	349 ,77	398, 98	372 ,14	430 ,74	473 ,81
6. Net Ekspor	-3 008 ,55	-2 671 ,90	-1 812 ,88	-1 309,02	-1 229 ,96
Total PDRB	32 665 ,98	32 687 ,59	34 896 ,96	38 788,93	42 735,55

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRBAdhk) 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah) Provinsi Jawa Tengah (33) Kabupaten Boyolali (09)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	17 383 ,18	17 288 ,26	17 507 ,54	18 570 ,05	19 573 ,97
2. Konsumsi LNPRT	324 ,70	315 ,60	320 ,56	336 ,25	359 ,79
3. Konsumsi Pemerintah	1 395 ,26	1 343 ,88	1 364 ,72	1 369 ,30	1 410 ,38
4. PMTB	4 613 ,87	4 358 ,14	4 709 ,83	4 813 ,49	5 315 ,15
5. Perubahan Inventori	189 ,43	358 ,70	300 ,34	339 ,25	352 ,82
6. Net Ekspor	-1 225 ,35	-1 254 ,85	-755 ,62	-497 ,03	-677 ,80
Total PDRB	22 681 ,10	22 409 ,73	23 447 ,37	24 931 ,30	26 334 ,30

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

Lampiran 3 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRBAdhk) 2010 menurut PengeluaranTahun 2019-2023 (Persen) Provinsi Jawa Tengah (33) Kabupaten Boyolali (09)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	77,74	78,09	74,88	74,38	73,90
2. Konsumsi LNPRT	1,60	1,58	1,55	1,57	1,58
3. Konsumsi Pemerintah	6,81	6,53	6,53	5,97	5,75
4. PMTB	21,99	20,76	21,17	20,34	20,54
5. Perubahan Inventori	1,07	1,22	1,07	1,11	1,11
6. Net Ekspor	-9,21	-8,17	-5,19	-3,37	-2,88

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara

Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBAdhb) menurut PengeluaranTahun 2019-2023 (Persen) Provinsi Jawa Tengah (33) Kabupaten Boyolali (09)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,97	-0,55	1,27	6,07	5,41
2. Konsumsi LNPRT	1,39	-2,80	1,57	4,89	7,00
3. Konsumsi Pemerintah	1,39	-3,68	1,55	0,34	3,00
4. PMTB	4,51	-5,54	8,07	2,20	10,42
5. Perubahan Inventori	5,49	89,35	-16.27	12,96	4,00
6. Net Ekspor	14,20	-2,41	39,78	34,22	-36,37

Total PDRB 5,96 -1,20 4,63 6,33 5,63

https://poyolalikab.bps.go.io

<sup>\*</sup> Angka Sementara\*\* Angka Sangat Sementara





### DATA MENCERDASKAN BANGSA

